



# Jurnal Bina Praja

JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

JURNAL BINA PRAJA | Vol. 6 No. 4 Edisi Desember 2014: 249 - 328

**Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Entrepreneur**  
Abdul Hamid

**Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat**  
Moh. Ilham A. Hamudy

**Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas**  
M. Soleh Pulungan

**Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa**  
Asrori dan Agus Supratiawan

**Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi  
(Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan Banguntapan,  
Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta)**  
Bambang Sunaryo dan Celly Cicellia

**Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan**  
Gusti Syahrany Noor

**Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di  
Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah**  
Gunawan

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
JAKARTA**



J. Bina Praja	Vol. 6	No. 4	Hal. 249 - 328	Jakarta, Desember 2014	ISSN 2085-4323
---------------	--------	-------	----------------	---------------------------	-------------------





Jurnal Bina Praja memuat pemikiran ilmiah, hasil-hasil kelitbangan, atau tinjauan kepustakaan bidang pemerintahan dalam negeri yang terbit empat kali dalam setahun setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember

# Susunan Redaksi

Pelindung:	Menteri Dalam Negeri	
Pembina:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	
Penanggung Jawab:	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri	
Pemimpin Redaksi:	Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd.	(Administrasi Publik, Kemendagri)
Anggota:	• Dr. Drs. Almuktabar M.Sc.	(Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri)
	• Subiyono, SH., M.Sc., Ph.D.	(Kebijakan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri)
	• Dr. Sorni Paskah Daeli	(Manajemen SDM, Kemendagri)
	• Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si.	(Pembangunan Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ekonomi Pembangunan, Kemendagri)
Mitra Bestari:	• Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.	(Hukum, Kemendagri)
	• Prof. Muchlis Hamdi, MA., Ph.D.	(Administrasi Publik, IPDN)
	• Dr. Syarif Hidayat	(Otonomi Daerah, LIPI)
	• Bashori Imron, M.Si	(Ilmu Komunikasi dan Media, LIPI)
Penyunting:	• Dra. Heriani Husaeny	
	• Emilia, SE.	
	• Eka Novian G., S.I.Kom	
	• Eny Setyaningsih, A.Md	
	• Dami Sukarsiah	
Tim Tenaga Ahli dan Administrasi	• Fransiskus Dasa Saputra, S.S.	
	• Syailendra Prahaswara, S.I.Kom.	
	• Fajar Wijaya	
	• Ibnu Abdilah	
	• Anggi Pratiwi, S.Hum.	
	• Meilya Rosi	
	• Pasco Mawando	

**Alamat Redaksi:**  
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat.  
Telepon: +62 21 310 1953 - 55, Fax. +62 21 392 4451  
E-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com  
Website: www.bpp.depdagri.go.id

Redaksi menerima karya ilmiah atau artikel penelitian, kajian, gagasan di bidang pemerintahan dalam negeri. Redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengubah makna substansi tulisan. Isi Jurnal Bina Praja dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Isi naskah KTI di luar tanggung jawab percetakan.



## Pengantar Redaksi

### Menata Kelitbangan: Refleksi 2014 & Resolusi 2015

Salam sejahtera, Pembaca yang budiman,

Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah selama ini mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Padahal, fungsi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan esensi dari pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam hal ini, pembinaan terkait dengan pemberian fasilitasi berupa petunjuk, pedoman, arahan dalam penyusunan perda, sedangkan pengawasan berkaitan dengan pertentangan perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan lainnya.

Munculnya berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memunculkan dugaan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang efektif. Melihat situasi demikian, salah satu penulis merasa perlu untuk melakukan pendalaman kembali terhadap efektivitas tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, guna menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan secara lebih komprehensif guna menghindari munculnya permasalahan di daerah.

Mengingat isu-isu yang dimuat dalam Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014 ini bervariasi, namun bermuara kepada satu titik, yaitu “bagaimana para penulis berkontribusi sumbang saran untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah”. Oleh karena itu, pada edisi kali ini, Redaksi tidak menentukan topik khusus, tetapi berharap berbagai informasi yang terangkum dalam edisi ini dapat membantu pembaca dalam memahami percepatan pembangunan di daerah.

Edisi terakhir tahun 2014 Jurnal Bina Praja disusun dengan sebuah semangat memenuhi kepentingan yang beragam. Dalam satu tahun penerbitan setelah terakreditasi, Redaksi mendapatkan banyak masukan mengenai arah, isi, dan penampilan jurnal. Dengan semangat memenuhi harapan tersebut, Redaksi berupaya menampilkan artikel-artikel dari berbagai perspektif. Sebagai konsekuensinya, pembaca dapat melihat begitu variatifnya cara penulisan artikel dalam jurnal ini, sesuai dengan latar belakang penulisnya.

Pada akhirnya, Redaksi mengapresiasi setiap naskah dan kontribusi pemikiran yang digulirkan oleh peneliti/perekayasa maupun para pemangku kepentingan lainnya. Redaksi mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan. Semoga Jurnal Bina Praja dapat menjadi wadah bertukar pikir untuk kemajuan bangsa.

Selamat membaca.

**Salam Redaksi.**







## Daftar Isi

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	iii
Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Enterpreneur Abdul Hamid	249 - 260
Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat Moh. Ilham A. Hamudy	261 - 268
Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas M. Soleh Pulungan	269 - 282
Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa Asrori dan Agus Supratiawan	283 - 292
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) Bambang Sunaryo dan Celly Cicellia	293 - 306
Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Syahrany Noor	307 - 314
Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Gunawan	315 - 328









Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Abdul Hamid

Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Entrepreneur  
DDC: 658.152

Jurnal Bina Praja  
Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 249 - 260

#### Abstrak

Dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil BUMD PT Gresik Migas berdasarkan kinerja, (2) Bagaimanakah strategi perbaikan kinerja BUMD PT Gresik Migas berbasis entrepreneur. Hasil analisis menunjukkan, (1) Kinerja diukur melalui metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik (2) Terdapat empat *strategis* untuk perbaikan kinerja BUMD, yaitu: (a) Kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUMD, termasuk penguatan jiwa entrepreneurship; (b) Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan main terkait pembentukan BUMD; (c) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (d) Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kinerja BUMD PT. Gresik Migas, sekaligus mengimplemetasikan 4 (empat) strategi yang telah di tetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu di sarankan, yaitu, (1) Bagi pemerintah daerah sebaiknya ada keberanian dan ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan *political cost*, menyusun SOP yang jelas terkait pola rekrutmen sumberdaya pengelola BUMD, konsisten untuk mendorong BUMD lebih mandiri dan profesional, tanpa intervensi, dan memberikan penghargaan pada pengelola yang berhasil membawa BUMD Go Public, (2) Bagi manajemen BUMD sebaiknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa depan, menumbuhkan jiwa leadership dan *entrepreneurship* terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh setiap individu, memberikan batasan para birokrasi dalam pemilikan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD, dan seluruh pimpinan diarahkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajiban

Kata Kunci: BUMD, analisis rasio, strategi pengembangan

Moh. Ilham A. Hamudy

Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat  
DDC: 363.35

Jurnal Bina Praja  
Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 261 - 268

#### Abstrak

Penelitian ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan metode deskriptif dipadukan pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil kajian menunjukkan, keberadaan Satlinmas masih meninggalkan banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain. Ketiga, citra Satlinmas di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi. Kata kunci: satuan perlindungan masyarakat, pertahanan sipil, bencana alam, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sistem keamanan lingkungan.

M. Soleh Pulungan

Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas  
DDC:336.598

Jurnal Bina Praja  
Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 269 - 282

#### Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi Simda terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Kesiapan



<p>sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi Simda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluative. Populasi penelitian terdiri dari 18 kecamatan dengan sample penelitian berjumlah 15 kecamatan, yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil kajian implementasi Simda di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk Simda dapat dilakukan diatas rata-rata standard yang ditetapkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi Simda di relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi Simda sudah cukup tinggi. <i>Software</i> Simda diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.</p> <p>Kata kunci: Simda, keuangan, implementasi, jaringan, regulasi</p>	<p>Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta) DDC: 352.48</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 293 - 306</p> <p>Abstrak Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan karakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari karakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif <i>self assessment</i> dan <i>flat</i> sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut.</p> <p>Kata kunci: kapasitas, keuangan daerah, pemerintah daerah, desentralisasi, pajak parkir</p>
<p>Asrori &amp; Agus Supratiawan</p> <p>Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa DDC: 307.72</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 283 - 292</p> <p>Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data potensi desa kurang akurat dan aktual; untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Pengisian data-data potensi/profil desa belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil desa belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1 orang dan tidak dibekali dengan Diklat pengumpulan data dan penyusunan profil desa; dan pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah Pusat dan Daerah kurang memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil desa. Perlunya kebijakan standar penggunaan sumber data dalam pengisian profil desa. Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan yang dibekali dengan diklat dan pengumpulan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian profil desa untuk menyederhanakan format Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.</p> <p>Kata kunci: kemampuan, Perangkat Desa, potensi desa.</p>	<p>Gusti Syahrany Noor</p> <p>Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan DDC:634.92</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 307 - 314</p> <p>Abstrak Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran tentang perkembangan hutan rakyat di Kalimantan Selatan dan informasi tentang sifat dan manfaat kayu hutan rakyat, dengan harapan kayu dari hutan rakyat ini dapat berkembang menjadi salah satu sumber bahan baku pengganti kayu hutan alam sehingga dapat mendukung perkembangan industri pengolahan kayu di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan rakyat terbukti sangat bermanfaat baik bagi pemiliknya, masyarakat dan lingkungannya serta bagi pemerintah daerah khususnya dalam rangka memenuhi pasokan kayu bulat untuk lokal. Sampai tahun 2011 luasan hutan rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah di Kalimantan Selatan telah mencapai 2.895 ha, dan yang paling luas berada di kabupaten Tanah Laut yakni seluas 935 ha. Jenis kayu yang dikembangkan adalah kayu sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. Sifat-sifat kayu tersebut perlu dipahami dan diketahui sebelum kayu bersangkutan dimanfaatkan baik sebagai bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, karena sifat-sifat tersebut pada dasarnya sangat menentukan kualitas produk kayu</p>
<p>Bambang Sunaryo &amp; Celly Cicellia</p> <p>Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan</p>	



<p>yang akan dihasilkan. Secara teknis kayu hutan rakyat dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, komponen perahu/perkapalan dan bahan baku industri. Kata kunci: perkembangan, hutan rakyat, Provinsi Kalimantan Selatan</p>	
<p>Gunawan</p> <p>Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah DDC: 352.14</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 315 - 328</p> <p>Abstrak Kecamatan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam penerapannya berupa kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia dan manajemen kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling daerah yang telah diserahkan dan belum diserahkan kewenangannya kepada kecamatan, hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan yang telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan, kelembagaan atau organisasi kecamatan belum menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas atributif dan delegatif. Kata kunci: Kecamatan, pemerintahan umum, kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia</p>	







Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

*Abdul Hamid*

*Investment Performance of PT. Gresik Migas Based on Entrepreneur*  
DDC: 658.152

*Jurnal Bina Praja*

*Volume 5 Number 4 December 2014 Edition: 249 - 260*

**Abstract**

*In knowing the company's ability to manage the capital invested by the investor, the need for measuring the financial performance of the company. This also applies to companies in the sphere of regional, or local government (Regional Owned Enterprises). Therefore, the focus of this study are: (1) How-owned PT Gresik Migas profile based on performance; 2) How is the performance improvement strategy-owned PT Gresik Migas entrepreneurs based on the scope of the Provincial Government of East Java. The results showed that; 1) Performance PT Gresik oil and gas enterprises in East Java province measured by the conventional method/Ratio Analysis indicates good results (2) There are four strategically to improve the performance of enterprises, namely: (a) the ability of the human resource managers of enterprises, including the strengthening of entrepreneurship spirit; (b) Clarity and firmness legal basis for the establishment of the rule of enterprises; (c) the financial management aspects of public enterprises; and (d) Feasibility and sustainability of the business or business unit-owned both the products and the services sector is measured based on the internal and external performance. To improve the performance of enterprises PT. Gas Gresik in East Java province, as well mengimplemetasikan 4 (four) strategy that has been set, then there are some things that need to suggest, namely; 1) For local government should have the courage and firmness to minimize various forms, practices and patterns which raises the political cost, prepare clear SOPs related enterprises managing resource recruitment patterns, consistent to encourage more independent and professional enterprises, without intervention, and pays tribute to the manager who managed to bring enterprises to Go Public; 2) for the management of public enterprises should be able to create an environment more conducive working and always oriented towards the task and the future, foster leadership and managers of enterprises and entrepreneurship to provide rewards for creativity generated by each individual, providing the bureaucratic restrictions on share ownership and open greater opportunities for the public to access stock in enterprises, and the entire leadership is directed to apply Good*

*Corporate Governance (GCG), namely transparency, independence, accountability and fairness*

*Keywords: enterprises, ratio analysis, strategy development*

*Moh. Ilham A. Hamudy*

*The Existence of Public Protection Unit*  
DDC: 363.35

*Jurnal Bina Praja*

*Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 261 - 268*

**Abstract**

*This research is about the Public Protection Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork conducted in October-November 2013 in the town of Magelang and Surabaya. This study used descriptive qualitative approach to explore the combined role and existence Satlinmas. The results of the study showed, the existence of the problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there has been no new regulations governing Satlinmas. Existing regulations are too weak and can not capture the times. Second, the formulation of concepts and basic tasks and functions Satlinmas overlap with other institutions. Third, Satlinmas image in society tend to fade and abused. Fourth, Satlinmas incorporation into the Municipal Police deemed not appropriate, because different philosophy.*

*Keywords: public protection unit, civil defence, natural disasters, peace and order society, and environmental safety systems*

*M. Soleh Pulungan*

*Simda Optimalization in The Making of Financial Management in Kutai District East Kalimantan Province To Be more Quality*  
DDC: 336.598

*Jurnal Bina Praja*

*Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 269 - 282*

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine: 1) Simda implementation of the financial management area in Kutai regency; 2) Readiness of human resources in charge of managing local finances and knowing the problems faced; 3) Infrastructure and support functions to the*

<p>implementation Simda in Kutai regency. This study is a survey with a descriptive evaluative research approach. The study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts, which are set by purposive sampling. Implementation results of the study in Kutai Kartanegara Simda have relatively high. All products Simda can do above average standards set regulations. Readiness of human resources for the implementation Simda in relatively good. Network support for implementation Simda already high enough. Software Simda admittedly quite good, but is quite vulnerable to virus attacks.</p> <p>Keywords: Simda, financial, implementation, networking, regulation.</p>	<p>research is aim to show that the parking tax management at glance seen as an administrative- procedural policy domain cannot release from phenomena on the existence of problematic pathology for regional financial management. District of Bantul Banguntapan characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub-urbanarea, began to metamorphose into a parking tax revenues fromregions that contribute to the area thoughnot as big financial contribution income tax parking tax in urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis unit in this research to represent the issue of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic of local finance managing problems can be observed and in-depth analyzed in Banguntapan sub district to seek the comparison of those 2 parking tax collection systems.</p> <p>Keyword: capacity, local finance, local government, decentralization, parking taxes</p>
<p>Asrori &amp; Agus Supratiawan</p> <p>Ability in Compiling The Village's Potential Profile DDC:307.72</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 283 - 292</p> <p>Abstract</p> <p>The aims of this research are to identify those unaccurated data. Moreover, to identify the capabilities of village government staffs when they collect village resources data; and also to analize what efforts to conduct for improving village government staffs. Descriptive analized with quantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect data wrong procedure. Furthermore, village government staffs in these samples are not capable to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the people who collecting village resource data for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and village profile are conducted by technical field assistant who have been educated and trained to collect those data. Finally, evaluations are needed to simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)</p> <p>Keywords: capability, village government staf, village resources.</p>	<p>Gusti Syahrany Noor</p> <p>Development of Community Forest in South Kalimantan Province DDC: 634.92</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 307 - 314</p> <p>Abstract</p> <p>The purpose of this study is to provide an overview of the development of community forests in South Kalimantan and information about the properties and benefits of community forest timber, the hopes community forests timber can be develop into a source of raw materials of natural forest wood substitute that can support the development of the wood processing industry in South Kalimantan. The result showed that Community forest proved to be very useful both for the owner, the community and the environment as well as for the government especially in order to meet the timber supply for local. Until the year 2011 the community forest area that was developed by the government in South Kalimantan has reached 2,895 ha, and the most widely are the Tanah Laut district covering 935 ha. The wood species that developed is sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. The properties of the wood needs to be understood and known before the relevant timber used both as a building material or as raw material for the industry, because these properties are basically determine the quality of wood products that will be produced. Technically private community forest wood can be used for building materials, components boat/ship and industrial raw materials.</p> <p>Keyword: developments, community forests, South Kalimantan</p>
<p>Bambang Sunaryo &amp; Celli Cicellia</p> <p>Urgency of Capacity Building in Local Finance Management on Decentralization Era (The Dinamic of Parking Taxes Management at Banguntapan District, Bantul Region, DI. Yogyakarta Province) DDC: 352.48</p> <p>Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 293 - 306</p> <p>Abstract</p> <p>Capacity building of local finance management becomes important on decentralizations era. Empirically this</p>	



Gunawan

*Role and Function Sub District in The Implementation of Local Government in Semarang City and District of Semarang Central Java Province*  
DDC: 352.14

*Jurnal Bina Praja*  
Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 315 - 328

*Abstract*

*Subdistrict in performing common functions pemerintahan implementation and administration functions of the tasks that have been submitted by Kanupaten City in accordance with the Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District experienced a bottleneck in its application in the form of authority, institutional, resource human resources and management districts, the study used a qualitative approach, purposive sampling areas that have been submitted and have not been handed over authority to the districts, the results showed that the authority has submitted both the mayor and the regent was not fully submitted, institution or organization not adjust districts Government Regulation No. 19 in 2008, the quality and quantity of human resources become a bottleneck in the implementation of tasks and discretionary attributive*

*Keywords: Districts, public administration, authority, institutional, human resource*

# KINERJA INVESTASI PT.GRESIK MIGAS BERBASIS ENTREPRENEUR

## *Investment Performance of PT. Gresik Migas Based on Entrepreneur*

**Abdul Hamid**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur

Jalan Gayung Kebonsari No 56 Surabaya, 60235

E-mail: [abdulhamid1208@yahoo.co.id](mailto:abdulhamid1208@yahoo.co.id)

Dikirim: 18 Agustus 2014; direvisi: 10 September 2014; disetujui: 12 Desember 2014

### **Abstrak**

Dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil BUMD PT Gresik Migas berdasarkan kinerja, (2) Bagaimanakah strategi perbaikan kinerja BUMD PT Gresik Migas berbasis entrepreneur. Hasil analisis menunjukkan, (1) Kinerja diukur melalui metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik (2) Terdapat empat *strategis* untuk perbaikan kinerja BUMD, yaitu: (a) Kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUMD, termasuk penguatan jiwa entrepreneurship; (b) Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan main terkait pembentukan BUMD; (c) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (d) Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Untuk meningkatkan kinerja BUMD PT. Gresik Migas, sekaligus mengimplemetasikan 4 (empat) strategi yang telah ditetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan, yaitu, (1) Bagi pemerintah daerah sebaiknya ada keberanian dan ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan *political cost*, menyusun SOP yang jelas terkait pola rekrutmen sumberdaya pengelola BUMD, konsisten untuk mendorong BUMD lebih mandiri dan profesional, tanpa intervensi, dan memberikan penghargaan pada pengelola yang berhasil membawa BUMD Go Public, (2) Bagi manajemen BUMD sebaiknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa depan, menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh setiap individu, memberikan batasan para birokrasi dalam kepemilikan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD, dan seluruh pimpinan diarahkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran

Kata Kunci: BUMD, analisis rasio, strategi pengembangan

### **Abstract**

*In knowing the company's ability to manage the capital invested by the investor, the need for measuring the financial performance of the company. This also applies to companies in the sphere of regional, or local government (Regional Owned Enterprises). Therefore, the focus of this study are: (1) How-owned PT Gresik Migas profile based on performance; (2) How is the performance improvement strategy-owned PT Gresik Migas entrepreneurs based on the scope of the Provincial Government of East Java. The results showed that; 1) Performance PT Gresik oil and gas enterprises in East Java province measured by the conventional method / Ratio Analysis indicates good results (2) There are four strategically to improve the performance of enterprises, namely: (a) the ability of the human resource managers of enterprises, including the strengthening of entrepreneurship spirit; (b) Clarity and firmness legal basis for the establishment of the rule of enterprises; (c) the financial management aspects of public enterprises; and (d) Feasibility and sustainability of the business or business unit-owned both the products and the services sector is measured based on the internal and external performance. To improve the performance of enterprises PT. Gas Gresik in East Java province, as well mengimplemetasikan 4 (four) strategy that has been set, then there are some things that need to suggest, namely; 1) For local government should have the courage and firmness to minimize various forms, practices and patterns which raises the political cost, prepare clear SOPs related enterprises managing resource recruitment patterns, consistent to encourage more independent and professional enterprises, without intervention, and pays tribute to the manager who managed to bring enterprises to Go Public; 2) for the management of public enterprises should be able to create an environment more conducive working and always oriented towards the task and the future, foster leadership and managers of enterprises and entrepreneurship to provide rewards for creativity generated by each individual, providing the bureaucratic restrictions on share ownership and open greater opportunities for the public to access stock in enterprises, and the entire leadership is directed to apply Good Corporate Governance (GCG), namely transparency, independence, accountability and fairness*

*Keywords: enterprises, ratio analysis, strategy development*



## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha membawa perkembangan pasar yang sangat pesat, menjadikan persaingan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Persaingan tersebut terjadi dalam hal perluasan usaha, perebutan konsumen, peluncuran produk baru, penggunaan teknologi informasi, dan segala inovasi yang terjadi dalam perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai sebuah perusahaan, maka akan mempermudah bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan modal karena semakin meningkatnya kepercayaan pada investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu adanya pengukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Potensi sumberdaya di Propinsi Jawa Timur perlu dikelola secara tepat agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu cara mengelola potensi tersebut adalah melalui BUMD, sehingga dibutuhkan kajian mengenai rasio dan strategi yang perlu dilakukan mengingat banyaknya investasi proyek yang gagal, baik pada tahap pembangunan maupun tahap operasi, selain itu dengan kajian mengenai rasio dan strategi dapat memungkinkan risiko kegagalan dapat diminimalisir. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah profil dan strategi BUMD PT. Gresik Migas berbasis entrepreneur.

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah yang sebagian besar atau seluruh kepemilikan asetnya maupun pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Irfan Sanjaya (2008).

Karakteristik BUMD meliputi:

1. Pemerintah daerah memegang hak atas usaha
2. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dan permodalan, baik secara mayoritas maupun keseluruhan
3. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
4. Pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap Negara yang berwenang
5. Melayani kepentingan umum, dengan motif keuntungan
6. Stabilisator perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, melalui kontribusi PDRB
7. Sebagai sumber pemasukan Negara dan daerah
8. Modal dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public
9. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, yang dapat diperoleh dari lembaga bank atau non bank

10. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakili BUMD di pengadilan

Menurut Irfan Sanjaya (2008) tujuan dari pendirian BUMD adalah:

1. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara dan daerah
2. Mendapatkan keuntungan
3. Laba bersih diharapkan mampu memberikan dampak positif PDRB suatu daerah
4. Perintis kegiatan usaha daerah
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil
6. Memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat suatu daerah
7. Sarana pembangunan daerah

Fungsi dan peran BUMD dalam menunjang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan
2. Alternative sumber dana bagi pembiayaan pembangunan
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

### a. Konsep Kinerja

Menurut Kiswara (2006) kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dapat dilakukan terhadap berbagai aktifitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian tersebut.

### b. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi. Dalam penerapan system pengukuran kinerja terdapat empat konsep dasar:

1. Menentukan strategi. Dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya.
2. Menentukan pengukuran strategi. Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal saja. Sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu.

3. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Pengukuran harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun informal, juga merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan.
4. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan. Manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. Kiswara (2006)

Pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penempatan sasaran dan tujuan serta pelaporan periodik yang mengidentifikasi realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan.

#### c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia sepakat bahwa penilaian ini merupakan bagian penting dari seluruh proses keorganisasian karyawan yang bersangkutan. Hal ini penting juga bagi perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Bagi karyawan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karir.

Bagi organisasi atau perusahaan sendiri, hasil penilaian tersebut sangat penting artinya dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutment, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari proses dari manajemen sumber daya manusia secara efektif.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mulyadi (2003) adalah:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, seperti: promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi evaluasi program pelatihan personel.
4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

#### d. Tahap Penilaian Kinerja.

Penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian Mulyadi (2003). Tahap persiapan terdiri dari tiga tahap rinci yaitu:

- a) Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggungjawab.
- b) Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja.
- c) Pengukuran kinerja sesungguhnya.

Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci yaitu:

- a) Pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar.
- c) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan.

Pengukuran kinerja yang selama ini lazim digunakan adalah pengukuran kinerja yang hanya menekankan pada perspektif keuangan saja. Tolak ukur yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan metode tradisional adalah hanya terbatas pada aspek keuangan. Memang benar kinerja keuangan sangat penting bagi semua perusahaan, tetapi apabila perusahaan hanya mengandalkan pada kinerja keuangan, ada kemungkinan perusahaan akan melupakan aspek-aspek lain yang juga penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu (sistem pengendalian manajemen dan operasional perusahaan yang hanya memandangnya berdasarkan pada ukuran dan target keuangan, sedikit berhubungan dengan kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan strategi jangka panjang karena hal tersebut akan mengaburkan atau menyembunyikan kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu nilai ekonomis di masa yang akan datang Kiswara (2006).

Penilaian dengan pengukuran kinerja tradisional berdasarkan kinerja keuangan atau yang biasa disebut pengukuran kinerja tradisional menekankan pengukuran kinerja perusahaan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan Zudia (2010), yaitu:

1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Utang, yaitu rasio yang menunjukkan batasan dimana perusahaan didanai oleh utangnya.
3. Rasio Pencakupan, merupakan rasio yang menghubungkan biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan untuk membayar biaya tersebut.
4. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya.
5. Rasio Laba, merupakan rasio yang menghubungkan laba dengan penjualan dan investasi.

Lebih lanjut Zudia (2010) mengatakan bahwa aspek finansial saja tidak cukup, bahkan bisa jadi tidak berguna karena beberapa alasan, yaitu:

1. Hal itu mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk kepentingan jangka panjang perusahaan.
2. Manajer unit bisnis mungkin tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang, untuk memperoleh laba jangka pendek.
3. Menggunakan profit jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan dapat mengganggu komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior.
4. Pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data.

Kelemahan-kelemahan pengukuran kinerja yang menitik beratkan pada kinerja keuangan yaitu:

1. Ketidakmampuannya mengukur kinerja harta-harta tak tampak (*intangible assets*) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan, karena itu kinerja keuangan tidak mampu bercerita banyak mengenai masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik.
2. Pengukuran lebih berorientasi kepada manajemen operasional dan kurang mengarah pada manajemen strategis.
3. Tidak mampu mempresentasikan kinerja *intangible assets* yang merupakan bagian struktur asset perusahaan.

Beberapa konsep kewirausahaan seolah identik dengan kemampuan para wirausahawan dalam dunia usaha (*business*). Padahal, dalam kenyataannya, kewirausahaan tidak selalu identik dengan watak/ciri wirausahawan semata, karena sifat-sifat wirausahawanpun dimiliki oleh seorang yang bukan wirausahawan. Wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan, baik karyawan swasta maupun pemerintahan. Wirausahawan adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang (*opportunity*) dan perbaikan (*preparation*) hidup. Berbeda dengan entrepreneur diatas, terdapat entrepreneur yang berdasarkan keentrepreneurannya berdasarkan keahlian berbasis pendidikan dan pelatihan yang didapatkan di bangku perkuliahan ataupun dari percobaan pribadi. Mereka menggunakan teknologi sebagai unsur utama pengembangan produk suksesnya, bukan sekedar jaringan, lobi dan pemilihan pasar secara demografis. Mereka disebut teknopreneur yaitu "*entrepreneur modern*" yang berbasis teknologi. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi untuk menghasilkan produk unggulan sebagai dasar pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan Arman dkk (2007).

Dengan demikian, kewirausahaan merupakan; suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis; selain itu kewirausahaan juga merupakan suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha serta suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda

(inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih dan dianggap sebagai usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan (Sanusi,1994).

## METODE PENELITIAN

### Metode Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu metode deskriptif, analitik dan korelasional. Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Metode analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menganalisis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Sedangkan metode korelasional merupakan kelanjutan dari metode deskriptif yang memiliki tujuan mempelajari hubungan secara statistik antara variabel-variabel yang sedang diteliti Nazir (1999).

### Metode Analisis Data

#### 1. Analisis Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja Keuangan yang dilakukan BUMD dianalisis dengan menggunakan Analisis Rasio Zudia (2010). Analisis rasio merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba maupun kombinasi dari keduanya. Dari hasil analisis rasio ini, dapat mengetahui gambaran mengenai baik buruknya keadaan atau posisi keuangannya. Adapun analisis rasio yang digunakan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas usaha. Dibandingkan dengan analisis lainnya, analisis rasio memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci.
3. Melihat perkembangan perusahaan secara periodik.
4. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

#### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban jangka pendek yang mampu dibiaya oleh aktiva lancar yang dimiliki BUMD Putri (2008). Rasio likuiditas diukur dengan:

##### 1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar mampu menutupi hutang-hutang lancarnya. Hutang lancar adalah hutang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek (biasanya dalam jangka satu



tahun atau kurang) dan yang pembayarannya akan mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 200 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}} \times 100\%$$

## 2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kemampuan BUMD dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasi menjadi uang kas. Rasio ini lebih tajam dari pada rasio lancar hanya memperbandingkan aktiva yang sangat likuid dengan utang lancarnya. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 150 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{Utang lancar}} \times 100\%$$

## b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan BUMD untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dikatakan *solvabe* apabila mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua kewajibannya. Rasio solvabilitas diukur dengan:

### 1. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva (*Equity to Total Asset Ratio*)

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman, artinya semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva BUMD. Rasio ini menunjukkan tingkat solvabilitas dengan anggapan bahwa semua aktiva akan dapat direalisasi sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 50 persen (Suwandi, 1985). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RMSTA} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap (*Equity to Fixed Asset Ratio*)

Rasio ini menunjukkan proporsi aktiva tetap yang dibiaya oleh modal sendiri. Apabila nilai rasio ini lebih dari 100 persen maka modal sendiri melebihi total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh modal sendiri dan sebagian dari aktiva lancar juga dibiayai oleh modal sendiri. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 150 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RMSAT} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total aktiva tetap}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Aktiva Tetap dengan Utang Tetap (*Fixed Asset Turnover Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan BUMD untuk memperoleh pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka akan memiliki jaminan yang semakin besar. Dengan

demikian kemampuan untuk mencari pinjaman akan semakin besar. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 150 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RATHT} = \frac{\text{Total aktiva tetap}}{\text{Total hutang jangka pendek}} \times 100\%$$

### 4. Rasio Total Hutang dengan Modal Sendiri (*Debt Equity Ratio*)

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal sendiri mampu menutupi hutang-hutangnya kepada pihak luar. Semakin kecil nilai rasio ini, maka akan semakin baik karena menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk menjamin semua hutang lebih besar. Rasio terbaik terjadi pada saat jumlah modal sendiri lebih besar dari jumlah hutang minimal sama. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 67 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RTHMS} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

### 5. Rasio Hutang dengan Total Aktiva (*Debt Ratio*)

Rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana hutang-hutang dapat ditutupi oleh total aktivanya. Dapat dikatakan juga berapa porsi hutang dibandingkan dengan total aktivanya. Agar aman maka porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil, semakin kecil pola resiko yang harus ditanggung. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 50 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RHTTA} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

## c. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan BUMD memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada selama periode tertentu, dengan demikian, rasio rentabilitas dapat dihitung sebagai berikut:

### 1. Rasio Laba Bersih (*Net Margin Ratio*)

Rasio ini menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan dari setiap Rp1,- penjualannya. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin besar pula kemampuan memperoleh laba bersih. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 4 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NMR} = \frac{\text{SHU} + \text{MEL}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Tingkat Pengembalian Modal Sendiri (*Return On Equity*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan keuntungan bersih berdasarkan modal sendiri. Semakin besar nilai rasio ini berarti semakin baik karena menunjukkan bahwa modal sendiri yang terpakai semakin produktif dalam menyumbangkan laba bersih. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 15 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{SHU} + \text{MEL}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Tingkat Pengembalian Investasi (*Return On Investment*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi, yaitu dengan mengukur kemampuan keuntungan bersih dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi koperasi agar menghasilkan keuntungan. Analisis ROI menunjukkan hubungan antara keuntungan yang diperoleh dari BUMD dan Manfaat Ekonomi Langsung (MEL) anggota dengan jumlah investasi yang digunakan. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 4 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ROI = \frac{SHU + MEL}{\text{Total investasi}} \times 100\%$$

#### d. Rasio Aktivitas Usaha

Rasio aktivitas usaha menggambarkan aktivitas yang dilakukan BUMD dalam menjalankan operasinya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kecepatan beberapa perkiraan menjadi penjualan atau kas. Rasio aktivitas usaha diukur dengan cara:

#### 1. Rasio Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover Ratio*)

Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Sehingga rasio ini mampu menggambarkan kemampuan dalam memutar barang dagangannya. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik karena dianggap kegiatan penjualan berjalan dengan cepat. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 10 kali. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ITOR = \frac{\text{Harga pokok penjualan}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Perputaran piutang (*Receivable Turnover Ratio*)

Rasio ini menunjukkan besarnya modal kerja yang ditanamkan sebagai piutang. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Standar yang baik untuk rasio ini minimal enam kali. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RTOR = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}} \times 100\%$$

#### 3. Rasio Perputaran aktiva tetap (*Fixed Asset Turnover Ratio*)

Rasio ini merupakan alat ukur efisiensi BUMD dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin baik, artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan penjualan tinggi. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 10 kali Suwandi (1985, hal 59). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$FATOR = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aktiva tetap}} \times 100\%$$

#### 4. Rasio Perputaran total aktiva (*Total Asset Turnover Ratio*)

Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi dimana BUMD menggunakan seluruh aktiva untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran aktiva maka semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. Standar yang baik untuk rasio ini adalah lima kali (Suwandi, 1985). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$TATOR = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil PT. Gresik Migas

#### 1. Sejarah & Status PT. Gresik Migas

PT. Gresik Migas didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006 Tanggal 7 Agustus 2006, dan dicatat dalam Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Tanggal 7 Agustus 2009. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gresik Migas dicatatkan pada Notaris Arief Hidayat, SH., M.Si Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2007 Nomor 43 dan Pengesahan Badan Hukum PT. Gresik Migas oleh Menteri Hukum dan Ham R.I. Nomor AHU-08065.AH.01.01. tanggal 19 Pebruari 2008.

#### 2. Tujuan Pendirian

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Gresik
- Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah
- Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

#### 3. Visi, Misi dan Motto

Visi:

“Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ternama di Indonesia yang bergerak di sektor hilir dan hulu migas.”

Misi:

- Usaha Hilir Migas yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ;
- Usaha-usaha di setor Hulu Migas ;
- Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/ Negara (BUMD/BUMN) dan Badan Usaha Swasta (investor) yang bergerak dalam Migas ;

#### Motto

PT. Gresik Migas sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Gresik adalah “GRESIK LEBIH BAIK” yang bermakna filosofi:

Gresik = wilayah asal kerja

Lebih baik = optimis bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini

#### 4. Bidang Usaha

- Niaga gas bumi melalui pipa dan Dedicated Hilir.
- Pengelolaan Sumur Minyak Tua.
- Usaha pengembangan CNG, LNG, LPG dan PLTG.
- Usaha-usaha di hulu migas berupa partisipasi di perusahaan KKKS dalam bentuk Participating Interest (PI).

#### 5. Kinerja Keuangan

##### a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan BUMD untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang mampu dibiayai oleh aktiva lancar yang dimiliki oleh BUMD. Hasil perhitungan rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar (*Current Ratio*), *Acid Test Ratio* dan rasio kas (*Cash Ratio*) dapat dilihat Tabel 1.

#### 2. Acid Test Ratio (Quick Ratio)

Rasio ini hanya membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan hutang lancar. Berdasarkan Tabel 1 nilai rata-rata rasio cepat yang dimiliki PD. RPH Surabaya pada tahun 2011 yaitu 126,31% artinya setiap Rp 1,00 hutang lancar PD. RPH Surabaya mampu menjamin Rp 126,31 aktiva lancar yang dimiliki tanpa memperhitungkan persediaan. Nilai rata-rata rasio cepat yang dimiliki PD. RPH Surabaya diatas standart minimum yaitu sebesar 150 % Kasmir (2008), Pada tahun 2012 nilai rasio ini mengalami penurunan menjadi 119,7%. Pada tahun 2012 PD. RPH Surabaya tidak mampu memenuhi standart minimum yang ditetapkan karena nilai rasio cepat yang dimiliki tidak mencapai 150%, sehingga PD. RPH Surabaya memiliki kekurangan untuk menjamin aktiva lancar sebesar 23,69%

#### 3. Cash Ratio

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan (*Obligasi*). Pada tahun 2011 nilai rasio kas yang dimiliki PT. Gresik Migas

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012

Periode	Rasio Lancar %	Rasio Kas %	<i>Acid Test Ratio</i>
2011	127,98 %	27,63 %	126,31 %
2012	119,33 %	18,15 %	119,07 %

Sumber: Laporan Keuangan PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah)

##### 1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio ini menunjukan kemampuan lembaga untuk membayar kembali kewajiban jangka pendeknya yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditasnya. Dari Tabel. 1, nilai rasio lancar yang dimiliki PT. Gresik Migas tidak memenuhi standar karena menurut Kasmir (2008), standart untuk rasio ini minimal 200 % sedangkan nilai PT. Gresik Migas pada tahun 2011 sebesar 127,9 % sedangkan pada tahun 2012 sebesar 119,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Gresik Migas belum mampu untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek yang dimiliki, karena memiliki tingkat rasio lancar kurang dari 200%.

sebesar 27,63 % sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 18,15 %. Berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh BI, maka nilai *cash Ratio* PT. Gresik Migas termasuk kategori “Sehat”, dikarenakan dalam jangka pendek perusahaan dapat membayar hutang dalam bentuk obligasi cepat untuk diuangkan, dan sudah lebih dari seratus persen.

##### b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan PT. Gresik Migas untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil perhitungan rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan rasio: Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva (*Equity to Total Asset Ratio*), Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap (*Equity to Fixed Asset Ratio*), Rasio Total Hutang dengan Total Modal Sendiri (*Debt Equity Ratio*) dan



Tabel 2. Perhitungan Rasio Solvabilitas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012

Periode	RMSTA (%)	RMSAT (%)	RTHTMS (%)	RTHTA (%)
2011	31,33 %	3850,65 %	219,19 %	68,67 %
2012	33,06 %	708,95%	202,50 %	66,94 %

Sumber: Laporan Keuangan PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah)

Rasio Hutang dengan Total Aktiva (*Debt Ratio*) dapat dilihat Tabel 2.

1. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva (*Equity to Total Asset Ratio*)

Rasio ini menggambarkan besarnya modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai total aktiva. Berdasarkan Tabel 2 nilai rasio modal sendiri dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu 31,33, artinya setiap Rp 1,00 total aktiva mampu dijamin dengan Rp 31,33 modal sendiri. Pada tahun 2012 nilai rasio modal sendiri dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik Migas yaitu 33,06, artinya setiap Rp 1,00 total aktiva mampu dijamin dengan Rp 33,06 modal sendiri. Nilai rasio modal sendiri dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik Migas belum mampu memenuhi standar minimum yaitu sebesar 50 % Suwandi (1985, hal 59). Untuk menjamin total aktiva dengan modal sendiri, maka PT. Gresik Migas harus mengusahakan kegiatan atau produk yang menarik minat pelanggan.

2. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap (*Equity to Fixed Asset Ratio*)

Rasio ini menggambarkan proporsi aktiva tetap yang dibiayai modal sendiri. Berdasarkan Tabel 2, nilai rasio modal sendiri dengan aktiva tetap yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu 3.850,65, artinya setiap Rp 1,00 aktiva tetap mampu dijamin dengan Rp 3.850,65 modal sendiri. Pada tahun 2012 nilai rasio modal sendiri dengan aktiva tetap yang dimiliki yaitu 708,95, artinya setiap Rp 1,00 total aktiva mampu dijamin dengan Rp 708,95 modal sendiri. Nilai rasio modal sendiri dengan aktiva tetap yang dimiliki PT. Gresik Migas sudah mampu memenuhi standar minimum yaitu sebesar 150 %. Hal ini berarti PT. Gresik Migas sudah mampu menjamin aktiva tetap dari modal sendiri yang dimiliki.

3. Rasio Total Hutang dengan Total Modal Sendiri (*Debt Equity Ratio*)

Hasil perhitungan rasio total hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas

dapat dilihat pada Tabel 2. Rasio ini menggambarkan jumlah total hutang yang dijamin dengan modal sendiri. Nilai rasio total hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu sebesar 219,19, artinya setiap Rp 1,00 total hutang yang dipinjam PT. Gresik Migas dapat dijamin dengan Rp 219,19 modal sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas. Pada tahun 2012 nilai rasio total hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas yaitu 202,50 artinya setiap Rp 1,00 total hutang yang dipinjam dapat dijamin dengan Rp 202,50 modal sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas. Berdasarkan Tabel 2, nilai rasio total hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas pada tahun 2011-2012 melebihi standar minimum yaitu 67 %. Pada tahun 2011-2012 nilai rasio total hutang dengan total modal sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas menurun. Hal ini disebabkan menurunnya pos hutang bank dan modal sendiri, namun penurunan yang terjadi masih menempatkan PT. Gresik Migas diatas standar minimum yaitu 67%, karena rasio total hutang dan total modal sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011-2012 masih diatas standar minimum 67%, yaitu sebesar 219,19% dan 202,50%.

4. Rasio Hutang dengan Total Aktiva (*Debt Ratio*)

Rasio ini menggambarkan jumlah aktiva yang digunakan untuk menjamin total hutang. Berdasarkan Tabel 2, nilai rasio total hutang dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu 68,67, artinya setiap Rp 1,00 total hutang tetap mampu dijamin dengan Rp 68,67 total aktiva. Pada tahun 2012 nilai rasio total hutang dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2012 yaitu 66,94, artinya setiap Rp 1,00 total hutang tetap mampu dijamin dengan Rp 66,94 total aktiva.

Berdasarkan Tabel 2, nilai rasio jumlah aktiva yang digunakan untuk menjamin total hutang PT. Gresik Migas pada tahun 2011-2012 masuk dalam standar minimum yaitu 50 %. Hal ini menunjukkan PT. Gresik Migas mempunyai aktiva yang

cukup untuk membiayai seluruh hutang-hutang hal ini dikarenakan rasio yang didapatkan telah mencapai lebih dari 50% persen yang disyaratkan, sedangkan BUMD ini telah mencapai antara 66 sampai 68 persen, artinya aktiva yang ada terjamin untuk membayar total hutang yang ditanggung.

### c. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan PT. Gresik Migas memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada selama periode tertentu. Hasil perhitungan rasio rentabilitas dihitung dengan menggunakan rasio: *Operating Margin Ratio*, *Return on Equity*, *Net Margin Ratio*, *Operating Ratio*, *Return On Asset* dan *Return On Investment* dapat dilihat pada Tabel 3.

mampu menghasilkan laba dan modal sendiri yang dimilikinya karena rasio tingkat pengembalian modal sendiri PT. Gresik Migas sudah lebih dari 15% yaitu sebesar 103,65% dan 103,65%.

### 3. Net Margin Ratio

Hasil perhitungan rasio laba bersih PT. Gresik Migas dapat dilihat pada Tabel 4.3. Nilai rasio laba bersih yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,58 persen artinya setiap Rp 1,- penjualan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 5,58 artinya margin laba bersih dari hasil penjualan hanya 5,58 selebihnya merupakan harga pokok penjualan dan biaya. Pada tahun 2012 nilai rasio laba bersih yang dimiliki PT. Gresik Migas yaitu sebesar 3,58 persen artinya setiap Rp 1,- penjualan mampu

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012

Periode	OMR (%)	ROE (%)	NMR (%)	OR (%)	ROA (%)	ROI (%)
2011	7,04 %	103,65 %	5,58 %	-1,57 %	41,00 %	32,47 %
2012	4,95 %	73,16 %	3,58 %	-1,70 %	33,47 %	24,19 %

Sumber: Laporan Keuangan PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah).

#### 1. Operating Margin Ratio

Laba usaha (laba operasi) adalah laba dari kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu sudah seharusnya laba ini memberikan hasil lebih besar dibanding dari laba yang bukan utama. Nilai OMR PT. Gresik Migas pada tahun 2011 sebesar 7,04 % sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 4,95 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan laba operasi pada tahun 2011 ke tahun 2012.

#### 2. Return on Equity

Hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian modal sendiri PT. Gresik Migas dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rasio tingkat pengembalian modal sendiri yang dimiliki PD. RPH Surabaya pada tahun 2011 yaitu sebesar 103,65 persen artinya setiap Rp 1,- modal sendiri mampu menghasilkan laba sebesar Rp 103,65,-. Pada tahun 2012 nilai rasio tingkat pengembalian modal sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas yaitu sebesar 73,16 persen artinya setiap Rp 1,- modal sendiri mampu menghasilkan laba sebesar Rp 73,16,-.

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2011-2012, PT. Gresik Migas sudah mampu memenuhi standart minimum rasio ini yaitu sebesar 15 % (Suwandi, 1985). Nilai rata-rata tingkat pengembalian modal sendiri PT. Gresik Migas pada tahun 2011-2012 sudah

menghasilkan laba sebesar Rp 3,58 artinya margin laba bersih dari hasil penjualan hanya 3,58% selebihnya merupakan harga pokok penjualan dan biaya.

Berdasarkan Tabel 3, pada tahun 2011, PT. Gresik Migas sudah mampu memenuhi standart minimum rasio ini yaitu sebesar 4 % (Suwandi, 1985) karena memiliki rasio laba bersih sebesar 5,58%, sedangkan pada tahun 2012 PT. Gresik Migas belum mampu memenuhi standart minimum yang ditetapkan sebesar 4 %, karena memiliki rasio laba bersih sebesar 3,58%. Pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah laba maupun jumlah penjualan dibandingkan tahun 2011 sebesar 2%.

#### 4. Operating Ratio

Rasio operasi menggambarkan perputaran operating assets dalam hubungannya dengan penjualan bersih dan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio operasi berarti menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan aktiva lancar yang dimiliki dalam meningkatkan penjualan bersih. Dalam tabel 5.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio operasi mencapai -1,57 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi -1,70. Hal ini berarti perusahaan sudah lebih mampu dalam memanfaatkan

aktiva lancar yang dimilikinya dengan meningkatkan penjualan bersih perusahaan.

##### 5. ROA (*Return On Asset*)

ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Pada tahun 2011 nilai ROA PT. Gresik Migas sebesar 41 % sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 33,47 %. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan simpanan pihak ketiga yang cukup tinggi. Berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh BI, maka nilai ROA PT. Gresik Migas termasuk kategori “Sehat”. Ini berarti bahwa PT. Gresik Migas sudah mampu memperoleh keuntungan secara keseluruhan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki.

##### 6. *Return On Investment* (ROI)

Hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian investasi PT. Gresik Migas dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rasio tingkat pengembalian investasi yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011 yaitu sebesar 32,47 persen artinya setiap Rp 1,- total aktiva mampu menghasilkan laba sebesar Rp 32,47. Pada tahun 2012 nilai rasio tingkat pengembalian investasi yang dimiliki PT. Gresik Migas yaitu sebesar 24,19 persen artinya setiap Rp 1,- total aktiva mampu menghasilkan laba sebesar Rp 24,19. Hal ini berarti laba yang dihasilkan PT. Gresik Migas sudah lebih tinggi daripada total aktiva, sehingga pengembalian investasi dapat lebih cepat dilakukan.

Berdasarkan Tabel 3, PT. Gresik Migas pada tahun 2011 dan 2012 sudah mampu memenuhi standart minimum rasio ini yaitu sebesar 4 %. Hal ini menunjukkan PT. Gresik Migas sudah mampu menghasilkan laba dari total aktiva. Nilai rasio tingkat pengembalian investasi yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011-2012 menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Hal ini menunjukkan keadaan yang semakin buruk yang mengindikasikan kemampuan PT. Gresik Migas dalam memperoleh laba dari total aktiva yang ditanamkannya semakin menurun. Hal ini dapat ditunjukkan penurunannya sekitar 8,18 persen selama dua tahun, hal ini seharusnya diwaspadai oleh PT Gresik Migas

dikarenakan kalau sampai terus meturun di tahun berikutnya dikawatirkan pengembalian investasi akan semakin berat dan dalam menghasilkan laba juga akan semakin menurun.

#### **Strategi Perbaikan Kinerja BUMD Berbasis Entrepreneur.**

Mengingat pentingnya peran perusahaan daerah dalam pengembangan perekonomian daerah, maka dalam menjalankan usahanya perusahaan daerah dituntut untuk lebih profesional dalam pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal. Terdapat faktor kunci strategis untuk perbaikan Kinerja BUMD PT. Gresik Migas Berbasis *Entrepreneurship* Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Kemampuan sumberdaya manusia BUMD, baik dari jajaran Direksi, Badan Pengawas, Pimpinan dan Karyawan, terutama terkait penguatan jiwa *enterpreunership* meliputi aspek kepercayaan diri, orientasi terhadap tugas dan hasil, keberanian dalam mengambil risiko, pola dan gaya kepemimpinan, kreatifitas dan orisinilitas produk/jasa dan fokus pada masa depan BUMD;
2. Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan main terkait pembentukan BUMD, agar mampu meminimalisir campur tangan dan intervensi dalam bentuk apapun dari para pemangku jabatan atau kalangan pemerintah. Terutama menyangkut keputusan manajemen sumber daya manusia (kebutuhan dan kualifikasi sumberdaya manusia dalam BUMD);
3. Aspek manajemen keuangan BUMD, meliputi: (a) mekanisme dan kejelasan penganggaran BUMD; (b) transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; (c); akuntabilitas berdasarkan kinerja, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budget*)”; (d) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan (*double accounting*)
4. Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Terdapat beberapa hal strategis, yaitu: (a) BUMD yang dinilai memiliki kinerja baik tetap berkonsentrasi terhadap usaha atau bisnis yang dijalankan, namun tetap melaksanakan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas dan distribusi produk. Pertumbuhan melalui strategi konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara mengambil alih fungsi supplier (*backward integration*) atau dengan cara mengambil alih fungsi distributor (*forward integration*); dan (b) BUMD yang dinilai kurang memiliki kinerja yang baik di dorong untuk

menerapkan strategi diversifikasi. Langkah strategis diambil mengingat kondisi internalnya cukup kuat, akan tetapi lemah dari aspek eksternal, dimana nilai daya tarik bisnisnya sangat rendah, sehingga perlu penciptaan produk baru atau layanan jasa yang lebih profesional.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, keberlanjutan suatu usaha harus memperhatikan strategi yang spesifik yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, konsentrasi pada bisnis yang ada namun diperlukan inovasi baru agar pelanggan tidak jenuh, serta pelayanan yang prima.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan pertama, kinerja BUMD PT. Gresik Migas di Provinsi Jawa Timur diukur melalui metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik. Kesimpulan kedua, terdapat 4 (empat) strategis untuk perbaikan kinerja BUMD, yaitu: (1) Kemampuan sumberdaya manusia pengelola BUMD, termasuk penguatan jiwa entrepreneurship; (2) Kejelasan landasan hukum dan ketegasan aturan main terkait pembentukan BUMD; (3) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (4) Kelayakan dan keberlanjutan usaha atau unit bisnis BUMD baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal.

## Saran

Untuk meningkatkan kinerja BUMD PT. Gresik Migas di Provinsi Jawa Timur, sekaligus mengimplemetasikan 4 (empat) strategi yang telah ditetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu di sarankan, yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah: (a) adanya keberanian dan ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan *political cost*; (b) menyusun SOP yang jelas terkait pola rekrutmen sumberdaya pengelola BUMD; (c) pemerintah konsisten untuk mendorong BUMD lebih mandiri dan profesional, tanpa intervensi; (d) pemerintah memberikan penghargaan pada pengelola yang berhasil membawa BUMD Go Public.
2. Bagi manajemen BUMD: (a) menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa depan; (b) menumbuhkan jiwa leadership dan *entrepreneurship* terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh setiap individu; (c) memberikan batasan para birokrasi dalam pemilihan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD; dan (d) seluruh pimpinan diarahkan untuk menerapkan *Good*

*Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman Hakim, Bustanul Arifin, Mokh.Suef,2007. *Entrepreneurship, Membangun Spirit Teknopreneurship*. Yogyakarta: Penerbit Andi.  
<http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/1346/Skripsi%20sri%20wahyuni.Pdf?Sequence=2> .(diambil pada 21 Oktober 2012).
- Junaidi. 2002. *Kontribusi Penerapan Balanced Scorecard Terhadap Peningkatan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Di Perusahaan Jasa Perantara Asuransi-Pt.Xyz)*.  
<http://Eprints.Binus.Ac.Id/10466/1/Abstrak02-46.Pdf>. (diambil pada 28 Oktober 2012).
- Kiswara, Hanuma. 2006. *Analisis Balance Scorecard Sebagai Alat Pengukur Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Astra Honda Motor)*  
<http://Eprints.Undip.Ac.Id/26355/1/Jurnal.Pdf>. (diambil pada 23 Oktober 2012).
- Mulyadi. 2001. *Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- M Nasir, 1999 *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Putri. 2008. *Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Konsep Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Solo)*.  
[http://Etd.Eprints.Ums.Ac.Id/67/1/B\\_200\\_040\\_053.Pdf](http://Etd.Eprints.Ums.Ac.Id/67/1/B_200_040_053.Pdf). (diambil pada 21 Oktober 2012)
- Wahyuni. 2011. *Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Pada Pt. Semen Bosowa Maros*.
- Zudia. 2010. *Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Konsep Balanced Scorecard Pada Pt Bank Jateng Semarang*.  
[http://Eprints.Undip.Ac.Id/23070/1/Skripsi\\_Anlisis\\_Penilaian\\_Kinerja\\_Organisasi\\_Dengan\\_Menggun.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/23070/1/Skripsi_Anlisis_Penilaian_Kinerja_Organisasi_Dengan_Menggun.Pdf). (diambil pada 28 Oktober 2012).



